

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zaenal, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Pers, Rajawali, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni and Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Christiawan, Rio, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali, Depok.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, West, St. Paul.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2019, *Hukum Kepailitan (Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitijo, Soemitro Ronny, 1996, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2003, *Hukum Kepailitan*, Banyu Media, Malang.
- Hasal, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hikmah, Mutiara, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hoff, Jerry, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Louise Tuegeh Longdong, Tineke, 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi*

- New York 1938, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Pernanan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, Moh., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Omar, Paul J., 2008, *Insolvency Law Themes and Perspectives*, Ashgate Publishing Company, Burlington.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Seto Hardjowahono, Bayu, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shubhan, M. Hadi, 2019, *Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono and Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, Daniel, 2007, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Susanti, Dyah Ochtorina and A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tomasic, Roman, 2005, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM LAINNYA

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters, 1971.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, cetakan 35, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, 2018.

RI, Mahkamah Agung, 2019, *Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri*, Jakarta.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Adolf, Huala, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28, 2009.

Damardjati, Respati, Emmy Latifah, and Al. Sentot Sudarwanto, “*Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN*”, Privat Law, Vol. V, 2017.

Deane, Felicity and Rosalind Mason, “*The UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency and the Rule of Law*”, International Insolvency Review, Vol. 1, 2016.

Gross, Karen, 1997, *Failure and Forgiveness: Rebalancing The Bankruptcy System*, Yale University Press, New Haven-Connecticut.

- Hikmah, Mutiara, “*Analisis Kasus-Kasus Kepailitan Dari Segi Hukum Perdata Internasional*”, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.
- Ibrani, Yulius, 2008, *Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA Republik Indonesia Nomor 033K/N/2006 jo. Nomor 16/Pailit/2006/PN Niaga Jkt. Pst.)*, Universitas Indonesia, Depok.
- Juwana, Hikmahanto, “*Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga*”, Hukum dan Pembangunan, Vol. 31, 2001.
- _____. “*Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*”, Jurnal Hukum Bisnis 17, 2002.
- M. Ngamirul Bustanil Asyhar dan Priyono, Djoko., 2018, *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Integration*, Universitas Diponegoro.
- Nating, Imran, “*Kepailitan dan PKPU Dalam Perspektif Kurator dan Pengurus*”, Presentasi Seminar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.
- Pane, Marjan E., “*Sekilas Tentang Tugas dan Wewenang Kurator*”, Makalah dalam Prosiding, 2005.
- Pradiendi, Dhua Putra, Tuti Muryati Muryati, and Muhammad Iftar Aryaputra, “*Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013*”, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2016.
- Satrio, Adi, R Kartikasari, and Pupung Faisal, “*Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor*”, Ganesha Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Sefa, M, “*Franken Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional*

Analysis”, *Oxvord Legal Studies*, Vol. 34, 2014.

Walters, Adrian, “*Modified Universalisms & The Role Of Local Legal Culture In The Making Of Cross-Border Insolvency Law*”, *American Bankruptcy Law Journal*, 2017.

SUMBER LAIN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, 2018.

United Nations. 1997, *Model Law in Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, New York, United Nations Publishing.